

DAFTAR PUSTAKA

RUPTL PT PLN (Persero) 2016 – 2025

RJPP PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali 2016 - 2020

Suherman.A.M., S.H., M.Sc (2017) Pengadaan barang dan jasa (*Government Procurement*) perspektif kompetisi, kebijakan ekonomi, dan hukum perdagangan internasional, Ed.1 Cet 2, Rajawali Pers, Depok.

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak., CA (2014) Pengadaan barang dan jasa BUMN, suatu kajian terhadap urgensi penyusunan standard operating procedure (SOP) pengadaan barang dan Jasa BUMN, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta

Siahaya. W (2016) Manajemen Pengadaan Procurement Management ABG (*Academic Bussiness Government*), Penerbit : ImMedia, Bogor.

Arsana. I.P., S.T., M.T (2016) Manajemen pengadaan barang dan Jasa pemerintah, Penerbit : Deepublish, Yogyakarta.

kraljic, p. (1983). *Purchasing must become supply management*. Boston, Massachusetts : Harvard Busines School Press

Alfred,D. Chandler,Jr. (1962). *Strategy and Structure* : Chapters in The History of The Industrial Enterprise. Cambridge Mass: MIT Press.

Hamel, Gary and Prahalad, C.K., (1989), *Strategic Intent*. Boston, Massachusetts : Harvard Busines School Press

Ishikawa, Kaoru. (1976), *Guide to Quality Control*, Hongkong : Imprint

Ishikawa, Kaoru. (1987), Pengendalian mutu terpadu, Penerbit : CV Remadja Karya, Bandung.

Michael E.Porter. (2008). *Competitive Advantage* (Keunggulan bersaing) : Menciptakan dan mempertahankan kinerja unggul. Kharisma Publishing : Tangerang

Republik Indonesia. 2016. Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia Nomor 5899.K/20/MEM/2016 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2016 s.d 2025. Kementrian ESDM. Jakarta

PT PLN (Persero).2013. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620.K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan perubahannya tentang pedoman umum pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero). PT PLN (Persero). Jakarta

- PT PLN (Persero).2016. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor :0010.E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang petunjuk teknis pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero). PT PLN (Persero).Jakarta
- PT PLN (Persero).2013. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0623.K/DIR/2013 tentang Statement of Corporate Intent untuk penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero).Jakarta
- Republik Indonesia.2014. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 2014 tentang kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.Kementrian ESDM. Jakarta
- Republik Indonesia.2008. Peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kementrian BUMN.Jakarta
- Republik Indonesia.2009. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia.2012. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.Sekretariat Negara.Jakarta
- Republik Indonesia.2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Sekretariat Negara.Jakarta
- Republik Indonesia.2009. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.46/M-DAG/PER/9 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.
- Republik Indonesia.2013. Peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi Nomor : 2 tahun 2013 tentang perubahan peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional nomor 02 tahun 2011 tentang cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi.LPJKN.Jakarta
- Republik Indonesia.2014. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.28 tahun 2014 tentang kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.Sekretariat Negara.Jakarta